

**PERAN ORGANISASI SUBAK DALAM KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI
DAN PEMERINTAH DALAM PEMANFAATAN AIR BAGI BIDANG PERTANIAN
(STUDI PADA KABUPATEN BADUNG)**

**Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni¹, Nanda Erlambang², Nurhasanah Haspiani³,
Kaisyah Cika Ramadhina⁴**

Email: khoirul_abror@civitas.unas.ac.id
miggnanda@gmail.com

^{1,3,4}Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Nasional

²Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pawayatan Daha

Abstract

This research aims to understand the role of the Subak organization in communication between organizations and the government in the use of water for agriculture in Badung Regency, Bali. Based on the results of research conducted through in-depth interviews, observations, and Focus Group Discussions (FGD), it was found that there was a significant information gap between policies made by the government and their implementation in the field, thus hampering the effectiveness of these policies. Modernization and urbanization have also led to an increase in the conversion of agricultural land to non-agricultural uses, thereby reducing the irrigation function of Subak. In addition, the younger generation's participation in subak activities is decreasing because they are more interested in other sectors that are more modern and financially promising. Therefore, creative initiatives are needed to attract the attention of the younger generation and increase effective communication between Subak and the government.

Keywords: *Subak, Communication, Government, Modernization, Urbanization, Young Generation, Irrigation, Agriculture.*

PENDAHULUAN

Menurut data Indonesia.go.id (2019) Indonesia secara geografis wilayahnya terletak diantara dua samudera, yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia, serta diapit oleh Benua Australia dan Asia. Indonesia sendiri memiliki luas teritorial sepanjang 1,905 juta km² yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, Indonesia diakui sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan total 264 juta penduduk. Tentu dari jumlah populasi penduduk terbanyak ini menggambarkan ekosistem alam yang juga tidak sedikit jumlahnya. Sebagai negara agraris yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam (SDA),

melabelkan Indonesia menuju kedaulatan pangan di dunia pada tahun 2045, adalah tahun dimana Indonesia memasuki usia yang ke 100 tahun. Melalui sektor pangan, komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia ini perlu disambut baik semua sektor, baik pemerintah, pengusaha, masyarakat umum hingga petani. Seperti halnya masyarakat daerah Pulau Dewata Bali, kerukunan mendasari keberagaman kehidupan mereka menjadi contoh budaya gotong royong di Indonesia. Hidup rukun, bersatu padu, dan terorganisir baik dalam suatu organisasi sangat penting bagi masyarakat Bali sebagai cara untuk saling melengkapi

disaat menghadapi masalah alam dan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, dengan bergabung dengan kelompok petani (Indonesia.go.id, 2019).

Organisasi Subak di Bali memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air untuk keperluan pertanian. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat tadat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Sebagai sistem yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, Menurut Sutawan, dkk (1986) dalam Windia, (2006), subak merupakan cerminan dari konsep Tri Hita Karana (THK) yang pada hakikatnya terdiri dari *parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan, yang dimanifestasikan melalui bangunan suci *subak* dan ritual yang mengikutinya diwilayah lahan persawahan), *pawongan* (hubungan antara manusia dengan manusia, yang kemudian lalu dimanifestasikan dalam kelembagaan *subak* dan interaksisosial yang terjadi di *subak*) dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam, yang dimanifestasikan dalam wilayah atau lahan pertanian yang menjadi wilayah usaha tani anggotanya). Lebih lanjut, Windia (2006) menyatakan bahwa system irigasi *subak* dapat dipandang sebagai system budaya masyarakat yang pada dasarnya memiliki tiga subsistem, yaitu: (i) sub sistem budaya (termasuk pola pikir, norma dan nilai), (ii) sub sistem sosial (termasuk ekonomi), dan (iii) sub sistem kebendaan (termasuk teknologi).

Menurut Ashara, Dkk (2022) Organisasi merupakan wadah yang mempertemukan antar satu orang atau

lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Upaya untuk mencapai tujuan tentu tidak lepas dengan berbagai faktor yang membuat proses kinerja tersebut berimbang.

Dengan kata lain, dibutuhkan komunikasi dan keharmonisan dalam berlembaga sehingga tercapai tujuan yang secara komprehensif dan konkret. Suatu organisasi secara mendasar sangat ditentukan oleh adanya manusia dan segenap sumber dayanya. Manusia lah dapat menggerakkan suatu organisasi vital dengan menghubungkan segenap tenaga serta pikiran, bakat, lalu kreativitas dan berupaya demi keberlangsungan pada kehidupan organisasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada peran organisasi subak dalam komunikasi antara organisasi eksternal dan kepada pemerintah dalam pemanfaatan air bagi bidang pertanian.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana strategi maupun cara konvensional Subak dalam berinteraksi dengan pemerintah dan dan memahami lebih bagaimana mereka menyampaikan kebutuhan serta masalah yang dihadapi para petani. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tata cara bagaimana kebijakan pemerintahan dapat mempengaruhi operasional Subak dan sebaliknya, bagaimana Subak dapat mempengaruhi seluruh kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air.

Dengan demikian maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran Subak dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Bali serta memperbaiki komunikasi antara Subak dan pemerintah. Meskipun Subak telah berhasil mengelola sistem irigasi di Bali selama berabad-abad, saat ini saja terdapat

beberapa permasalahan yang sangat perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutannya. Salah satu diantaranya masalah utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif efisien antara Subak dan pemerintah sehingga hal ini sering kali menyebabkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga menghambat operasional Subak. Selain itu, modernisasi dan urbanisasi yang pesat di Bali juga membawa tantangan barubagi Subak.

Menurut Aryudhani (2023) menjelaskan bahwasannya Hampir seluruh subak (system pengairan, ed.) di Bali mengalami alih fungsi lahan setiap tahunnya. Kondisi ini diiringi alih fungsi lahan untuk permukiman dengan lajudua hektare per tahunnya, Tercatat hingga akhir 2022, lahan pertanian diwilayah Denpasar tersisa 1.871 hektare.

Dalam konteks ini, penting bagi Subak untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan menemukan cara untuk tetap mempertahankan fungsi irigasi dan sosialnya. Terakhir, kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap peran dan fungsi Subak di kalangan generasi muda juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak generasi muda yang lebih tertarik pada pekerjaan di sektor non-pertanian dan tidak melanjutkan tradisi keluarganya dalam mengelola Subak.

Menurut Werembian, dkk (2018) dapat menjelaskan bahwasannya Pekerjaan pada sektor pertanian sudah mulai berkurang sejak berkurangnya minat generasi muda untuk bergabung atau bekerja sebagai petani, sehingga tidak jarang terlihat bahwa para petani sekarang lebih banyak melibatkan teknologi untuk mengelola lahan. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan Subak jika tidak ada upaya

untuk melibatkan generasi muda dalam pengelolaan subak dan untuk mempertahankan warisan budaya. Penelitian ini juga memiliki manfaat yang sangat penting dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan Subak di Bali.

Pertama, penelitian ini akan meningkatkan komunikasi serta koordinasi antara Subak dan pemerintah dan jika mampu mengidentifikasi hambatan serta komunikasi yang ada lalu merumuskan solusi yang efektif, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat lebih sesuai dengan seluruh kebutuhan dan dapat menyesuaikan kondisi lapangan, sehingga meningkatkan efektivitas operasional Subak.

Selanjutnya, penelitian ini akan mampu memberikan wawasan mengenai bagaimana cara Subak dapat beradaptasi dengan perubahan akibat modernisasi dan urbanisasi. Bali mengalami laju alih fungsi lahan pertanian yang tinggi setiap tahunnya, sehingga sangat penting untuk merumuskan strategi agar Subak dapat mempertahankan fungsi irigasinya dan sosialnya di tengah perkembangan urbanisasi yang pesat. Selain itu dalam penelitian ini akan meningkatkan pemahaman serta berbagai apresiasi generasi muda terhadap peran dan fungsi Subak.

Saat ini, banyak generasi muda yang lebih tertarik pada pekerjaan di sektor non-pertanian dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan tradisi turun temurun keluarganya mengelola Subak. Maka dalam penelitian ini akan dapat mengkaji alasan dibalik kurangnya minat dari generasi muda dan menemukan cara serta strategi meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan Subak. Hal ini sangat penting untuk bisa memastikan

keberlanjutan Subak sebagai warisan budaya yang berharga. Urgensi penelitian ini sangat nyata, mengingat pentingnya koordinasi yang efektif antara Subak dan pemerintah untuk menghindari kebijakan yang tidak tepat. Ancaman urbanisasi terhadap lahan pertanian juga membutuhkan strategi adaptasi yang segera agar Subak dapat bertahan. Selain itu, tanpa keterlibatan pihak dari generasi muda, keberlanjutan Subak sebagai sistem irigasi tradisional dan warisan budaya akan terancam.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret yang tidak hanya memperbaiki kinerja Subak saat ini tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem irigasi tradisional ini di masa depan, seiring dengan tantangan modernisasi dan regenerasi petani melalui komunikasi organisasi subak dengan pemerintah sehingga diharapkan dapat memberikan kebijakan handal, tepat sasaran dan keberlangsungan eksistensi dari organisasi subak dapat menguntungkan petani di wilayah Kabupaten Badung.

METODE

Dalam penelitian ilmiah ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang ada dilapangan serta berusaha menampilkan data sekunder dan primer yang didapat pada kantor pemerintahan di wilayah Kabupaten Badung. Suharsimi Arikuntoro (2010) bahwa Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun beberapa jenis instrumen

penelitian yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan *Focus Group Discussion*.

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan diskusi dengan beberapa nara sumber terkait yaitu I Wayan Wijana, Sos, MSi (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung), I Wayan Suyasa, S.Sos., MM jabatan (Dirut Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM Kabupaten Badung), Made Adi Adyana, S.P., M.A.P (Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Badung/Bali), I Nyoman Suardan sebagai (Kepala Perbekel Desa Mengwitani), Drs. I Made Suweti (Perwakilan Organisasi Subak). Diskusi dengan seluruh pihak terkait dilakukan untuk menggali informasi yang berguna melengkapi serta menjawab beberapa rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti sehingga data serta informasi yang didapatkan bersifat konkret dan transparan.

Dalam menganalisa pola pada koordinasi dan efektifitas komunikasi antara organisasi Subak, pemerintah Kabupaten Badung dan lembaga terkait maka penulis dapat menentukan teknik analisis data yang mumpuni untuk dapat mengakomodasi tujuan dan hasil penelitian ini. Dari model analisis data interaktif oleh (Miles, Huberman, Saldana 2014) digunakan penulis untuk menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut: reduksi data yang dilakukan untuk memilih dan memilah data yang relevan serta dapat memfokuskan pada pembahasan dari rumusan masalah. Temuan penjabaran seluruh data tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulannya dan akhirnya penelitian ini dapat disajikan sesuai dengan fakta dan data konkret yang diperoleh penulis dilokasi penelitiannya. Selanjutnya

penyajian data dapat berbentuk tulisan, tabel maupun grafik yang tujuannya adalah menggabungkan informasi dan data dapat menginterpretasikan kepada pembaca beberapa alasan mendasar dari penggabungan seluruh data yang sesuai dengan keadaan yang konkret dan koheren.

Penarikan kesimpulan dari seluruh data dan informasi oleh penulis dilakukan pada tahap akhir dengan memperhatikan seluruh aspek yang terkait akademis, faktual dan informatif. Setelah melalui reduksi data dan penyajian data maka selanjutnya tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dapat dilakukan peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola komunikasi yang terjalin antara organisasi subak dengan pemerintah Kabupaten Badung menjadi hal krusial dengan perannya masing-masing. Terdapat gap yang ditemukan pada tahap komunikasi bahwa perlu ada jalur komunikasi yang lebih baik dan terstruktur antara organisasi Subak dan pemerintah untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi petani bisa diakomodasi, maka dari itu diperlukan koordinasi dengan dinas pertanian dan pangan Kabupaten Badung dan PDAM Kabupaten Badung untuk dapat melakukan kegiatan rutin dengan subak. gap informasi yang signifikan antara perumusan kebijakan-implementasinya di lapangan menjadi tantangan yang beberapa solusinya peningkatan dalam transparansi dan frekuensi komunikasi yang sekarang lebih aktif melaksanakan kegiatan dengan masyarakat dan organisasi subak khususnya. Lebih lanjut apabila komunikasi terjadi secara tidak efektif dapat menimbulkan terhambatnya beberapa proyek kolaboratif. PDAM dalam beberapa kesempatan seringkali mengalami kesulitan masif dalam

sinkronasi jadwal dan pemahaman teknis antara tim PDAM dan organisasi Subak. Komunika ini harus mengalir baik dari bawah keatas, pun sebaliknya dari atas kebawah dan juga memanfaatkan penyuluh pertanian untuk dapat menjembatani pemerintah dan petani, agar mengurangi gap informasi yang terjadi dilapangan sehingga komunikasi yang efektif antara organisasi subak dan pemerintah dapat berjalan dengan baik, agar gap informasi tidak terjadi lagi dilapangan dan diharapkan dapat meminimalisir dampak lain yang bisa menjadi ancaman organisasi subak dalam menggarap lahan pertanian. Misalnya seperti dampak modernisasi dan urbanisasi. Menurut data yang disadur dari Badan Busat Statistik Kabupaten Badung yang menunjukkan jumlah Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun (2014-2017) sebagai berikut:

Gambar 1: Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung (Tahun 2014-2017) 2024

No	Tahun	Kecamatan						Badung
		Kl S	Kl	Kl U	Mgw	Abs	Ptg	
1	2014	0,0	27,0	1 307,0	4 564,0	2 913,0	1 173,0	9 984,0
2	2015	0,0	20,0	1 300,0	4 572,0	2 916,0	1 198,0	10 006,0
3	2016	0,0	20,0	1 283,9	4 568,0	2 910,8	1 203,0	9 975,7
4	2017	0,0	18,0	1 250,1	4 568,0	2 908,7	1 203,0	9 937,8
Perkembangan 4th		0,0	(9,0)	(56,9)	(6,0)	(4,3)	30,0	(46,2)
Rata-rata 4th		0,0	(2,2)	(14,2,5)	(1,5)	(1,1)	7,5	(11,6)

Sumber: Badan Pusat Statisitk Kabupaten Badung, 2024

Kemudian jika dibandingkan data dari dampak modernisasi dan urbanisasi dapat dilihat dari perkembangan luas lahan bukan pertanian di Kabupaten Badung ditahun yang sama yaitu tahun (2014-2017), dengan data detail sebagai berikut:

Gambar 2: Perkembangan Luas Lahan Bukan Pertanian Kabupaten Badung (Tahun 2014-2017)

No	Tahun	Kecamatan						Badung
		Kl S	Kl	Kl U	Mgw	Abs	Ptg	
1	2014	8.390,0	1.588,0	1.873,0	1.433,0	936,0	1.388,0	13.608,0
2	2015	8.469,0	1.591,0	1.890,0	1.445,0	937,0	1.388,0	13.720,0
3	2016	8.468,6	1.591,0	1.906,1	1.469,0	941,5	1.388,0	13.754,2
4	2017	8.468,6	1.592,0	1.933,9	1.459,0	943,5	1.388,0	13.785,0
Perkembangan 4th		78,6	4,0	60,9	26,0	7,5	0,0	177,0
Rata-rata 4th		19,7	1,0	15,2	6,5	1,9	0,0	44,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024.

Perkembangan dari luas lahan bukan pertanian menunjukkan adanya peralihfungsian lahan pertanian menjadi bukan pertanian dan sawah karena masyarakat sekarang selalu menjual lahan mereka baik tanah dan sawah, yang mana di buat untuk mendapatkan keuntungan dengan peralihfungsian menjadi ruko, villa atau rumah makan, dsb. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perda Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Apabila lahan tersebut tidak di tangani dengan tepat bisa jadi lahan pertanian dan sawah kita habis muncul tembok-tembok semen dimana-dimana yang berdampak juga kepada pemanfaatan air. Menindak lanjuti tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) pihak Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Badung akan melaksanakan sosialisasi di masing-

masing kecamatan sebaran LP2B sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 382/048/HK/2022 tentang Penetapan Peta dan Sebaran LP2B dengan cara sosialisasi menjadi penting sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat baik petani dan masyarakat umum untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya alih fungsi di Kawasan LP2B, melalui sosilassi ini diharapkan masyarakat sadar dan peduli dalam pengawasan dan melaporkan kepada instansi apabila terdapat indikasi pelanggaran. Secara keseluruhan penelitian ini lebih menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungan antara subak dan pemerintah untuk memastikan penggunaan air pertanian yang optimal dan ketersediaan lahan persawahan di Kabupaten Badung.

Berdasarkan dengan teori komunikasi pemerintah, komunikasi yang baik dapat membantu mengintegrasikan kegiatan dengan cara yang terorganisir, menyalurkan input sosial, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pertanian dan pengelolaan air maka perlu dilakukan perbaikan saluran komunikasi antara subak dan pemerintah, dengan mempertimbangkan fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integrative dari komunikasi pihak pemerintah. Modernisasi dan urbanisasi Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penggunaan lahan pertanian.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada gambar 1 selama periode empat tahun, dari 2014 hingga 2017, dapat dilihat bahwa rata-rata pengurangan luas lahan sawah mencapai sekitar 11,6 hektar per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi konversi

lahan pertanian yang cukup signifikan setiap tahunnya. Lebih lanjut, data yang ditampilkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa pada periode yang sama, yaitu dari tahun 2014 hingga 2017, rata-rata penambahan luas lahan non pertanian mencapai sekitar 44,3 hektar per tahun.

Data ini mengindikasikan bahwa lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian kini beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, seperti untuk perumahan, industri, dan infrastruktur lainnya, sebagai akibat dari proses urbanisasi dan modernisasi yang terus berkembang. Lebih lanjut menurut organisasi subak masalah antusiasme penggarapan lahan pertanian ini diperparah dengan kurangnya minat generasi muda terhadap kegiatan subak dan pertanian.

Generasi muda dominan lebih tertarik dengan pekerjaan di sektor lain yang dianggap modern serta menjanjikan secara ekonomi finansial. Banyak yang tidak lagi melihat pertanian sebagai karir yang menarik. Perbedaan antara dua generasi tua yang memahami dan dapat menghargai subak dan generasi muda yang lebih tertarik pada gaya hidup kontemporer maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya, pemerintah perlu secara aktif berkomunikasi dengan seluruh generasi muda, masyarakat, dan organisasi subak itu sendiri. Alih fungsi lahan pertanian ini mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat, dimana kebutuhan akan ruang untuk kegiatan non pertanian semakin meningkat dan dengan seiring banyak pertumbuhan penduduk dan perkembangan urbanisasi fenomena ini perlu dikelola dengan baik agar dampak negatif terhadap ketahanan

pangan dan lingkungan dapat diminimalisir.

PENUTUP

Penelitian bertujuan untuk memahami peran organisasi subak dalam komunikasi antara mereka dengan pemerintah dalam pemanfaatan air untuk pertanian di Kabupaten Badung, Bali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dalam, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD), ditemukan beberapa poin penting.

Pertama, terdapat kesenjangan informasi yang cukup signifikan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan implementasinya di lapangan. Informasi dari pemerintah sering kali tidak jelas atau terlambat, sehingga menghambat efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Komunikasi yang tidak efektif antara subak dan pemerintah sering kali menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan pertanian dan pengelolaan air.

Kedua, dampak modernisasi dan urbanisasi telah menyebabkan peningkatan konversi lahan pertanian kepenggunaan non-pertanian. Hal ini mengakibatkan berkurangnya luas lahan sawah dan berkurangnya fungsi dari irigasi subak. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan ini. Ketiga, partisipasi generasi muda dalam kegiatan Subak mengalami penurunan. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada pekerjaan di sektor lain yang dianggap lebih modern dan menjanjikan secara finansial, mengakibatkan

kurangnya minat untuk terlibat dalam kegiatan Subak. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif yang lebih kreatif untuk menarik perhatian generasi muda dan melibatkan mereka dalam pengelolaan Subak. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara organisasi Subak-pemerintah, serta perlunya upaya untuk mengatasi dampak modernisasi dan urbanisasi, dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan Subak untuk memastikan adanya keberlanjutan pertanian di Kabupaten Badung, Bali.

REFERENSI

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Aryudhani, N. (2023, Desember 27). Judul artikel dari Muslimah News. Muslimah News. Diakses pada 26 Juli 2024, (<https://muslimahnews.net/2023/12/27/25946/>).
- Ashara, A., Mustari, A. M., & Idris, M. (2022). Implementasi komunikasi organisasi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sulawesi Selatan. *Ilmu Komunikasi*, Universitas Muslim Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2017). *Luas Lahan dan Penggunaannya Kabupaten Badung 2017*. Badung: BPS Kabupaten Badung. Diakses pada 27 Juli 2024 (<https://badungkab.bps.go.id>)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2024). *Kabupaten Badung Dalam Angka 2024*. Badung: BPS Kabupaten Badung. Diakses pada 27 Juli 2024 dari <https://badungkab.bps.go.id>.
- Lazuardi, A. (2023, Juli 23). *Pemkab Badung terus lestarikan Subak*. Antara News. Diakses pada 26 Juli 2024, dari <https://bali.antaranews.com/berita/30788/pemkab-badung-terus-lestarikan-subak>.
- Paramita, A., & Kristiana, L. (2013). Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. Diakses pada 27 Juli 2024, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/233111569.pdf>.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Subak dalam Filosofi Tri Hita Karana : Manifestasi Agraris Masyarakat Dewata Bali*. Indonesia.go.id. Diakses pada 26 Juli 2024, dari <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1600/subak-dalam-filosofi-tri-hita-karana-manifestasi-agraris-masyarakat-dewata-bali?lang=1..>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak*. Ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2012. Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2012. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9.
- Saldana, Miles, & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publication.
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi pemerintahan: Mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 36-54.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Nanda Erlambang, Nurhasanah Haspiani, Kaisyah Cika Ramadhina : Peran Organisasi Subak Dalam Komunikasi Antara Organisasi Dan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Air Bagi Bidang Pertanian (Studi Pada Kabupaten Badung)

Suharsimi Arikunto. (2007). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: BumiAksara.

Werembinan, C. S., Pakasi, C. B. D., & Pangemanan, L. R. J. (2018). Persepsi Generasi Muda Terhadap Kegiatan Pertanian di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado.